

FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan sektor perkebunan menjadi salah satu prioritas pembangunan tahun 2022. Komoditas perkebunan yang akan dikembangkan, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, kelapa dan kakao.

Pembangunan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung usaha perkebunan, penguatan kelembagaan, perlindungan sumber daya, pengembangan agro industri, serta peningkatan penerapan standarisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19,



Prioritas pembangunan perkebunan tahun 2022 sesuai sasaran prioritas Pemprov Sumut sesuai dengan visi misi Gubernur, Membangun Desa dan Menata Kota, dengan tema Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan ujar Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara **Ir. Nazli. M.MA** dalam acara Forum Perangkat Daerah Penyusun Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 di Hotel Kanaya, Selasa (4/4/2019). Dan dihadiri oleh Kepala Dinas

Pertanian dari Kabupaten dan juga Kepala Bidang yang mebidangi Perkebunan dikabupaten juga Steakholder/Lembaga yang membidangi Perkebunan.



Subsektor perkebunan, jelasnya, memegang peranan penting dalam perekonomian Sumut. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara (ProvSU) selama lima tahun terakhir.

Rata-rata kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Sumut masing-masing sebesar 11,1% dan 13,5%. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, 37,52% tenaga kerja di Sumut berkarya di sektor pertanian lahan seluas 2.169.601,62 hektare.



“Untuk mewujudkan target tersebut, dibuatlah kebijakan operasional yang meliputi pengembangan komoditas nasional melalui penerapan budidaya yang baik, pengembangan kawasan pertanian nasional, pengembangan perbenihan tanaman perkebunan, penguatan kelembagaan perkebunan dan pengembangan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil,” jelas Sekretaris Dinas Perkebunan.

Semua program itu, paparnya, dirumuskan melalui program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Sumut **Beliau** mengatakan, pihaknya berharap semua kegiatan perkebunan berbasis kawasan, sehingga hasilnya lebih terlihat. Kegiatan perkebunan

harus sinergitas antara hulu dan hilir, misalnya apa yang diinginkan eksportir tentang standar kualitas untuk ekspor tersampaikan pada petani



H. Dhody Thahir, SE., MBA selaku ketua DPRD Komisi B Sumatera Utara yang membidangi perkebunan juga mengharapkan agar terjadinya Sinergitas antara Hulu dan Hilir dibidang Perkebunan agar terwujudnya Sumatera Utara yang bermartabat dan juga terjadinya percepatan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Selain itu juga hadir sebagai Narasumber dari Dirjenbun Bapak Boy Arif Saputra. Dan pada pertemuan ini di hadiri juga dari pihak Akademisi, Asosiasi dari komoditi Karet, Kopi dan Kelapa Sawit. Melalui Peraturan Menteri Pertanian, katanya, sudah ada penetapan kawasan strategis nasional, di Sumatera Utara ada komoditi kopi di empat daerah Sumatera Utara, yakni Humbang Hasudutan, Karo, Dairi dan Toba Samosir.



Sejalan dengan itu, dalam paparannya ibu Sri puspa Sari. ST mengatakan melalui program Sitantri (Sistem Pertanian Terintegrasi dan terpadu) “Pemerintah Provinsi pun bakal membentuk Kawasan Strategis Provinsi di dalam kawasan itu nanti sektor agrari menyatu dan terpadu, di satu desa akan ada tanaman perkebunan, tanaman pangan dan perternakannya,” jelasnya. Terdapat catatan sebagai masukkan Narasumber Bappeda dengan program Prioritas pembangunan berkelanjutan sumatera utara : Kelapa sawit berkenajutan di dalamnya juga membahas kontribusi kelapa awit terhadap pembangunan rendah karbon melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendukung pembangunan Agro Wisata Kopi di Sumatera Utara.